



e-Modul

# PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas  
2019



**WILAYAH NEGARA, WARGA  
NEGARA DAN PENDUDUK,  
AGAMA DAN  
KEPERCAYAAN, SERTA  
PERTAHANAN DAN  
KEAMANAN**

**Penyusun :**  
Gita Pratiwi, S.Pd  
SMAN 1 Sekayu

**Reviewer :**  
Alpian Irama, S.Pd., MH

**Validator :**  
Alpian Irama, S.Pd., MH

e-Modul 2019  
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Daftar Isi

## Daftar Isi

## Peta Konsep

## Glosarium

## Pendahuluan

Identitas Modul

Kompetensi Dasar

Deskripsi

Petunjuk Penggunaan Modul

Materi Pembelajaran

## Kegiatan Pembelajaran I

1. Tujuan

2. Uraian Materi

3. Rangkuman

4. Latihan Essay

5. Latihan Pilihan Ganda

6. Penilaian Diri

## Kegiatan Pembelajaran II

1. Tujuan

2. Uraian Materi

3. Rangkuman

4. Latihan Essay

5. Latihan Pilihan Ganda

6. Penilaian Diri

## Kegiatan Pembelajaran III

1. Tujuan

2. Uraian Materi

3. Rangkuman
4. Latihan Essay
5. Latihan Pilihan Ganda
6. Penilaian Diri

### **Kegiatan Pembelajaran IV**

1. Tujuan
2. Uraian Materi
3. Rangkuman
4. Latihan Essay
5. Latihan Pilihan Ganda
6. Penilaian Diri

### **Evaluasi**

### **Daftar Pustaka**

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Peta Konsep



**Gambar :**  
Peta Konsep  
(SUMBER PUSTAKA)



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Glosarium

**Apatride** : seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan.

**Asas Ius Sanguinis** : asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan orangtuanya, di mana pun ia dilahirkan.

**Asas Ius Soli** : asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.

**Bipatride** : seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan.

**Multipatride** : seseorang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan

**Naturalisasi** : tata cara bagi orang asing atau bangsa lain untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

**Zona Ekonomi Eksklusif** : Wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas



Daftar Isi





- 4.2.2 Menyajikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.
- 4.2.3 Mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.
- 4.2.4 Menyaji identifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.

## **DESKRIPSI**

---

Para siswa hebat, selamat berjumpa dengan modul pembelajaran Biologi. Pada modul ini anda akan menjelajahi pengetahuan tentang ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Modul ini mencakup uraian materi tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta didik dapat menganalisis ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

## **PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL**

---

1. Modul ini dapat kalian pelajari dalam waktu 8 jam pelajaran.
2. Bacalah seluruh uraian materi pada setiap kegiatan pembelajaran yang ada dalam modul ini secara utuh agar memiliki pemahaman yang baik tentang materi yang akan dipelajari

3. Setiap kegiatan belajar diakhiri dengan latihan soal dan penilain diri, diharapkan kalian telah menguasai materi lebih dari 80% sebelum mempelajari kegiatan belajar berikut..
4. Jika dalam mempelajari modul ini kalian menemukan hal-hal yang belum bisa dipahami, silahkan berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kalian yang menurut pandangan kalian memiliki kemampuan untuk menjelaskan atau kalian dapat mencari informasi di berbagai media.
5. Pada bagian akhir dari modul ini disiapkan soal evaluasi untuk mengetahui ketercapaian kompetensi secara utuh tentang Ketentuan UUD NRI tahun 1945. Diharapkan ketercapaian yang kalian peroleh minimal 80 %.

"Pendidikan setingkat dengan olahraga dimana memungkinkan setiap orang untuk bersaing" – **Joyce Meyer**

"Sekolah maupun kuliah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mereka mengajarkan kita cara berpikir logis, analitis dan praktis." – **Azis White**.

## **MATERI PEMBELAJARAN**

---

Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Adapun pokok-pokok materi yang akan kita bahas seperti berikut ini :

- wilayah negara.
- warga negara dan penduduk.

- beragama dan berkerpercayaan.
- pertahanan dan keamanan.



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Kegiatan Pembelajaran I

## 1. TUJUAN

---

Melalui kegiatan belajar mandiri dengan memahami isi uraian materi tentang ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara, warga Negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, dengan pengamatan gambar, animasi dan video pada modul ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif (kemandirian), kerjasama (gotong royong) dan kejujuran (integritas).

Mengawali pembelajaran modul ini perhatikan video/gambar berikut ini:



**Video 1: Sejarah Wilayah Indonesia (NKRI) dari Masa ke Masa**

sumber :<https://www.youtube.com/watch?v=hTF6YTysUPM&t=335s>



**Gambar : Pakaian adat pemersatu bangsa**  
(sumber: <https://carakus.com/pakaian-adat-indonesia/>)

"Untuk mencapai sesuatu, harus diperjuangkan dulu. Seperti mengambil buah kelapa, dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak." – **Mohammad Natsir**

## 2. URAIAN MATERI

Pelajar anak negeri sekalian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis bagi negara kita yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, fungsi dan kewenangan lembaga negara, agama, dan masih banyak lagi. Bab dua ini kita akan secara khusus mempelajari ketentuan konstitusi

negara kita yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

## 2.1. Wilayah Negara

Wilayah negara adalah suatu ruang yang meliputi **wilayah laut, wilayah darat, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial**. Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah wilayah. Rasanya tidak mungkin ada negara di dunia ini yang tidak mempunyai wilayah. Semua negara pasti mempunyai wilayah. Cobalah kalian amati gambar di berikut ini dengan seksama!



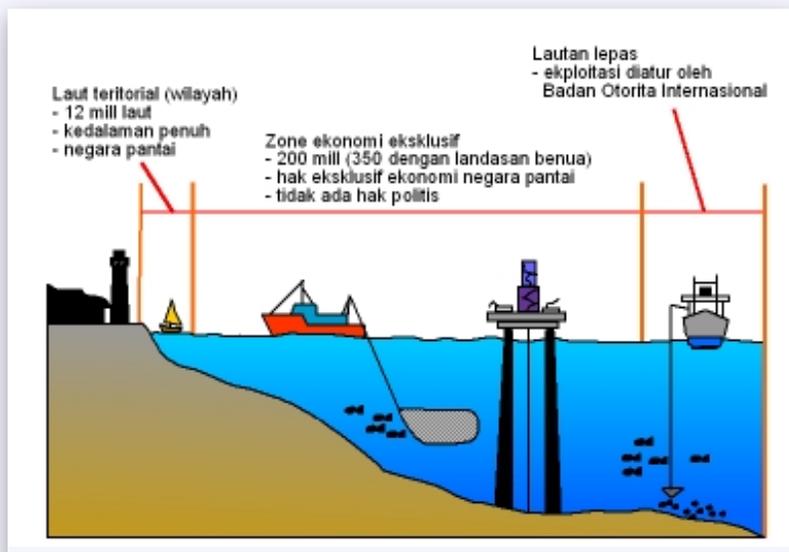
**Gambar 2: Peta Negara Indonesia**

(sumber: <https://www.jurnalindonesia.net/pentingnya-kebijakan-satu-peta-indonesia/>)

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang

terkandung di dalamnya. Macam-macam wilayah Indonesia dibahas lebih lanjut berikut ini.

- a. **Wilayah Perairan** adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Menurut Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB adalah 1) Batas laut teritorial, 2) Batas zona bersebelahan, 3) Batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), 4) Batas landas benua.



**Gambar 3 : Pembagian wilayah laut Indonesia**

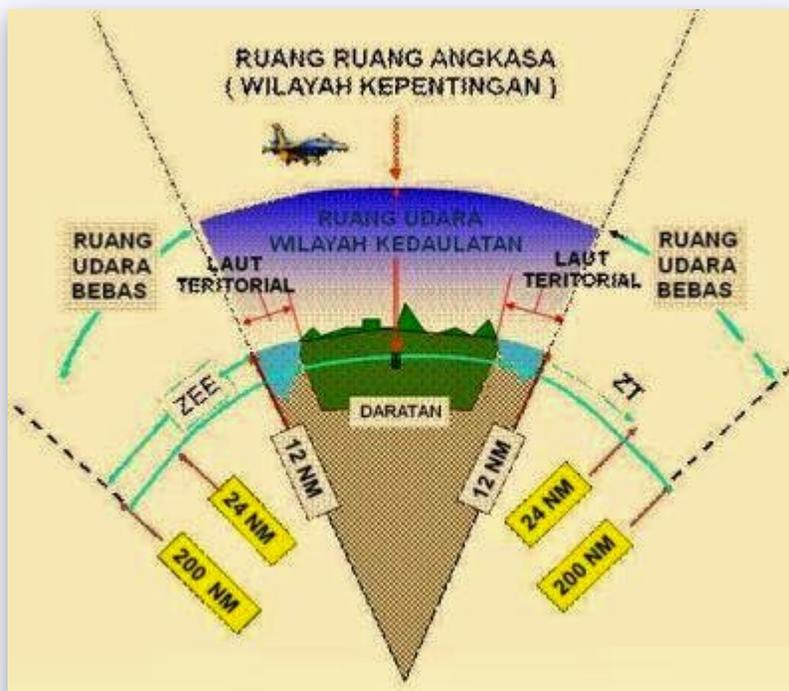
(sumber:

<http://sakersomu.blogspot.com/2016/08/pembagian-wilayah-laut-indonesia.html>)

- b. **Wilayah Daratan** adalah tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan.

c. **Wilayah Udara** adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Gambar di bawah merupakan kekuasaan atas wilayah udara Indonesia.

d. **Wilayah Ekstrateritorial** adalah suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional, maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah dari suatu Negara.



Gambar 4 : wilayah ruang angkasa

(sumber:

<http://baiqsetiani.blogspot.com/2014/06/ruang-udara-dan-wilayah-udara-nasional.html>)

Setiap wilayah pasti ada batasnya, berikut Perbatasan wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan dipaparkan sebagai berikut.

1. Perbatasan Wilayah Indonesia di Sebelah Utara. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.
2. Perbatasan Wilayah Indonesia di Sebelah Barat. Berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat.
3. Perbatasan Wilayah Indonesia di Sebelah Timur. Berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik
4. Perbatasan Wilayah Indonesia di Sebelah Selatan. Berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia

### **3. RANGKUMAN**

---

1. Wilayah negara merupakan suatu bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara, dari negara tersebut.
2. Ruang lingkup wilayah negara merupakan satu kesatuan wilayah suatu negara meliputi: wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya, wilayah perairan, wilayah dasar laut dan

tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, dan wilayah ruang angkasa.

"Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki." – **Bung Hatta**



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Latihan Essay I

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Sebutkan pembagian wilayah perairan Indonesia berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut internasional!

Alternatif penyelesaian

02. Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan?

Alternatif penyelesaian

03. Sebutkan batas-batas wilayah daratan Indonesia di bagian utara!

Alternatif penyelesaian

04. Sebutkan bunyi dari undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) ?

Alternatif penyelesaian

05. Sebutkan dasar hukum wilayah Indonesia!

Alternatif penyelesaian



Daftar Isi

## Latihan Pilihan Ganda 1

1. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mill laut diukur dari pantai disebut...

- A res communis
- B res nullius
- C ZEE
- D mare liberum
- E batas laut teritorial

2. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara adalah....

- A pasal 30
- B pasal 28 E
- C pasal 26
- D pasal 27
- E pasal 25 A

3. Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....

- A 18 ayat (1)
- B 18 ayat (2)
- C 18 ayat (3)
- D 25 A

E 37

4. Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya....

- A 3 mil
- B 12 mil
- C 24 mil
- D 200 mil
- E 11 mil

5. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut wilayah....

- A negara
- B teritorial
- C darat
- D udara
- E ekstrateritorial

6. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan....

- A pancasila
- B perda
- C undang-undang
- D peraturan pemerintah
- E peraturan presiden

Perhatikan peraturan perundang-undangan berikut.1) UUD NRI Tahun

7. 1945 Pasal 25 A 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 3) PP Nomor 38 Tahun 2002 pasal 1 4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Berikut peraturan peraturan perundang-undangan yang mengandung penjelasan mengenai wilayah Indonesia ditunjukkan nomor...

- A 1), 2), dan 3)
- B 1), 3) dan 5)
- C 2), 3) dan 4)
- D 1), 4) dan 5)
- E 2), 4) dan 5)

8. Wilayah laut di tetapkan berdasarkan isi dari traktat multilateral di Montego Bay pada tahun 1982. Salah satu isinya adalah...

- A ZEE merupakan wilayah laut sejauh 200 mil di ukur dari daratan ke pantai
- B laut teritorial merupakan wilayah yang tidak menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara
- C zona bersebelahan merupakan wilayah 15 mil di luar laut teritorial
- D landas benua merupakan wilayah laut suatu negara yang jaraknya lebih dari 200 mil laut dari pantai
- E landas kontinen merupakan daratan di bawah permukaan laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter

9. Wilayah laut indonesia berbatasan dengan 10 negara. Berikut yang tidak termasuk negara-negara tersebut adalah...

- A Malaysia
- B Australia

- C Philipina
- D Myanmar
- E Vietnam

10. Sebuah kapal penangkap ikan asing melakukan penangkapan ikan di suatu lokasi di perairan Indonesia. Petugas Indonesia memberikan peringatan karena kapal tersebut menangkap ikan pada jarak 180 mil dari pantai terdekat. Kapal asing tersebut diperingati karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia yang termasuk dalam....

- A landas kontinen
- B landas benua
- C laut teritorial
- D Zona Ekonomi Eksklusif
- E Laut bebas



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Apakah saya telah mengikuti upacara bendera setiap hari senin dengan baik	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Saya telah memahami makna posisi strategis negara Indonesia	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Apakah modul yang saya buat dapat di pahami dengan baik isinya	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
04.	Saya selalu berupaya untuk menggunakan produk-produk lokal Indonesia	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
05.	Saya dapat menjelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Kegiatan Pembelajaran 2

## 1. TUJUAN

Siswa digital yang brilian, kamu diharapkan makin Luar Biasa setelah melalui kegiatan kedua ini. Diharapkan melalui kegiatan belajar mandiri dengan memahami isi uraian materi tentang ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara, warga Negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, dengan pengamatan gambar pada modul ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif (kemandirian), kerjasama (gotong royong) dan kejujuran (integritas).

Mengawali pembelajaran modul ini perhatikan gambar berikut ini:



**Gambar : Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

(sumber :

<http://infodanpengertian.blogspot.com/2016/02/pengertian-ktp-kartu-tanda-penduduk>)

"Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi." – **Jenderal Sudirman**

## 2. URAIAN MATERI

---

### 2.1. Warga Negara dan Penduduk :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis bagi negara kita yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, fungsi dan kewenangan lembaga negara, agama, dan masih banyak lagi. Pertemuan 2 ini kita akan secara khusus mempelajari ketentuan konstitusi negara kita yang mengatur tentang warga negara dan penduduk.

Penentuan Warga Negara diatur dalam :

Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945 "Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Pasal 26 Ayat (2) UUD 1945 "Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia".

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1. **Asas kelahiran (Ius Soli)** adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang.
2. **Asas keturunan (Ius sanguinis)** adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan.

Penerapan asas-asas kewarganegaraan tersebut dalam sebuah negara akan menimbulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. **Apatride** yaitu seseorang tidak mendapat kewarganegaraan. Contohnya seseorang yang dilahirkan oleh orang tua yang negaranya menganut asas ius soli, sedangkan negara tempat seseorang tersebut dilahirkan menganut asas ius sanguinis.
2. **Bipatride** yaitu seseorang yang memperoleh dua kewarganegaraan. Contohnya seseorang yang dilahirkan oleh orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis, sedangkan negara tempat seseorang tersebut dilahirkan menganut ius soli.

2.2. Warga Negara Indonesia :

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah sebagai berikut. :

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

### 2.3. Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia :

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
2. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
3. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.

4. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
5. Mengangkat sumpah atau setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
6. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
8. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara. Tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

### **3. RANGKUMAN**

---

1. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dan kekuasaan negara
2. Warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya

"Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri." – **RA Kartini**



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Latihan Essay 2

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. “Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia” merupakan bunyi dari pasal....

Alternatif penyelesaian

26 ayat (1)

02. Contoh batas buatan dalam wilayah daratan adalah....

Alternatif penyelesaian

kawat berduri, pagar, tembok, tiang, patok, maupun pos penjagaan

03. Setiap orang yang bertempat di suatu negara dalam waktu tidak terbatas, dan terdiri dari warganegara dan bukan warganegara disebut....

Alternatif penyelesaian

penduduk

04. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada menteri.....

Alternatif penyelesaian

kehakiman

05. Seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan disebut....

Alternatif penyelesaian

Bipatride



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Latihan Pilihan Ganda 2

1. Penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari Negara lain disebut...
- A devrivation
  - B renunciation
  - C representator
  - D depriator
  - E termination
- 
2. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau keturunan disebut...
- A lus sanguinis
  - B lus soli
  - C kewarganegaraan tunggal
  - D kewarganegaraan ganda
  - E asas tempat kelahiran
- 
3. Warganegara yang baik adalah warganegara yang dapat menggunakan haknya secara bertanggung jawab untuk....
- A kemanusiaan
  - B pamer
  - C kemasyarakatan
  - D kekeluargaan

E negara

4. Berikut kewajiban sebagai warganegara Indonesia, kecuali....

- A menjaga dan melestarikan lingkungan
- B hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- C hidup rukun dengan sesama
- D membayar pajak
- E patuh, taat dan menjalankan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku

5. Berikut cara-cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali....

- A kelahiran
- B kematian
- C pernikahan
- D pengangkatan
- E permohonan kewarganegaraan

6. Istilah konstitusi di Negara Inggris adalah....

- A constituer
- B constitution
- C constitutie
- D copnstituere
- E verfassung

7. Semua orang yang bertempat tinggal dan mendiami wilayah suatu negara yang tunduk dalam peraturan dari kekuasaan negara ...

- A warga negara
- B bukan warga negara
- C warga negara asing
- D penduduk
- E penduduk

8. Seseorang yang berdasarkan hukum bukan anggota wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing disebut...

- A penduduk
- B bukan penduduk
- C masyarakat
- D bukan warga negara
- E warga negara

9. Suatu status hukum yang dimiliki seseorang karena tidak memenuhi syarat sebagai warga negara berdasarkan pada asas ius soli maupun ius sanguinis disebut...

- A multipatride
- B apatride
- C bipatride
- D naturalisasi
- E repudiasi

10. Bianca adalah seseorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli yang lahir di negara B yang menganut asas ius soli oleh, karena ia keturunan bangsa A dianggap sebagai warga negara A, tetapi negara B

juga menganggapnya sebagai warga negaranya karena ia lahir di negara B, dengan kondisi yang demikian munculah masalah status kewarganegaraan yang disebut ...

- A apatride
- B dwipatride
- C bipatride
- D multipatride
- E naturalisasi



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Penilaian Diri 3

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Apakah anda sudah memahami kandungan Pasal 26 UUD 1945 ?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Apakah kamu telah memahami asas dalam menentukan kewarganegaraan di Indonesia ?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Saya memahami hal-hal yang dapat menyebabkan WNI kehilangan kewarganegaraan	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
04.	Apakah anda mengetahui tata cara bagi orang asing agar menjadi WNI ?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
05.	Apakah anda mengetahui syarat naturalisasi ?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Kegiatan Pembelajaran III

## 1. TUJUAN

Selamat berjumpa lagi...Siswa Nusantara.

Melalui kegiatan belajar mandiri dengan memahami isi uraian materi tentang ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara, warga Negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, dengan pengamatan gambar pada modul ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif (kemandirian), kerjasama (gotong royong) dan kejujuran (integritas).

Mengawali pembelajaran modul ini perhatikan gambar berikut ini:



**Gambar 6 : Tempat ibadah di Indonesia**  
(sumber: [www.remaja.gmim.or.id](http://www.remaja.gmim.or.id))

"Hidup dan mati ada dalam genggaman Ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir

hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalau pun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan." – **Pangeran Diponegoro**

## 2. URAIAN MATERI

---

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis bagi negara kita yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, fungsi dan kewenangan lembaga negara, agama, dan masih banyak lagi. Pertemuan 3 ini kita akan secara khusus mempelajari ketentuan konstitusi negara kita yang mengatur tentang agama dan kepercayaan dalam menjaga keutuhan negara.

Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia memiliki banyak pulau yang berjajar dari Sabang hingga Merauke, banyak kebudayaan yang memiliki ciri khas tersendiri dengan sistem sosial masyarakatnya yang unik. Jangankan berbeda pulau, dalam satu pulau saja kita memiliki perbedaan yang menjadi ciri-ciri masing-masing daerah. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut harus tetap ada sebagai corak bangsa Indonesia yang budayanya terkenal sebagai kebudayaan yang beradab dan adiluhung. Karena itu kita butuh mengenal satu sama lain demi terciptanya nilai-nilai toleransi dan saling menghargai sama lain sebagai satu masyarakat hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.1. Agama dan Kepercayaan

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan bermakna bahwa setiap manusia memiliki kebebasan secara hakiki dalam memilih, melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Indonesia hanya mengakui 6 Agama, yakni Islam, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Adanya keragaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup.

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 29 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

Pasal 29 (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

UUD Negara Republik 1945 BAB X A tentang Hak Asasi Manusia yaitu pasal 28 E (1) dan (2) dan pasal 28 I ayat (1).

Pasal 28 E (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945::

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Keragaman agama yang ada di Indonesia bukan menjadi pemecah bangsa akan tetapi justru menjadi alat pemersatu bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Kristen Protestan, 2,9% Kristen Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Berikut ini adalah peta persebaran agama-agama di Indonesia:



**Gambar 6 : Agama yang beragam menjadi kekuatan negara**

(sumber:

<https://abelpetrus.wordpress.com/geography/indonesia-dalam-keragaman-sosial-dan-budaya/>)

### 3. RANGKUMAN

---

1. Negara Indonesia memberikan kebebasan terhadap warga negaranya untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing setiap warga negaranya. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia telah dijamin secara yuridis konstitusional. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ketiga dan alinea keempat, serta pasal 29 dan pasal 28 E ayat (1 dan 2) UUD NRI Tahun 1945

“ Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama ”



[Daftar Isi](#)

## Latihan Essay 3

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan kepercayaan itu?

Alternatif penyelesaian

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan bermakna setiap warga Negara memiliki kebebasan dan melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

02. Apakah dalam kemerdekaan beragama kita memiliki hak untuk memaksakan agama kita kepada orang lain?

Alternatif penyelesaian

Tidak. Karena arti kemerdekaan beragama adalah tidak memaksakan seseorang dalam hal beragama. Melainkan, memberi kebebasan yang sama kepada setiap warga Negara dalam meyakini ajaran agama tertentu.

03. Jika setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, apakah boleh bagi kita untuk tidak beragama?

Alternatif penyelesaian

Tentu saja tidak. Karena kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beriman kepada

Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu Indonesia merupakan negara yang berketuhanan.

04. Apa yang menjadi bukti bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berketuhanan?

Alternatif penyelesaian

Sesuai dengan Pancasila sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Diatur juga dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat 1.

05. Apakah Dunia mendukung kebebasan beragama dan berkepercayaan tersebut?

Alternatif penyelesaian

Tentu saja, Piagam HAM PBB ( The Universal Declaration of Human Rights) Pasal 18. Menyebutkan bahwa orang berhak akan kebebasan, keyakinan, dan agama termasuk pindah agama.



Daftar Isi

## Latihan Pilihan Ganda 3

1. Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, Toleransi berasal dari kata "Toleran" yang berarti...
- A Bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya
  - B Bersikap Tidak peduli kepada Agama lain
  - C Melecehkan apabila pendiriannya berbeda
  - D Saling menjatuhkan antar umat beragama
  - E Bersikap Anarkis apabila kekeyakinannya berentangan dengan orang lain
- 
2. Dalam membina kerukunan umat beragama, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Wadah Musyawarah Antar Umat beragama. Hal tersebut tertuang dalam ....
- A Keputusan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1980
  - B Penetapan Presiden RI Nomor 1 tahun 1965
  - C Instruksi Menteri agama Nomor 4 tahun 1978
  - D Surat Kawat menteri Dalam Negri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75
  - E Surat Edaran menteri agama Nomor MA/432/1981
- 
3. Salah satu Hambatan dalam menciptakan Kerukunan Umat beragama adalah...
- A Saling Gotong royong
  - B Tidak memaksakan kehendak orang lain agar keyakinannya sama

- C Makin bergesernya pola hidup berdasarkan kekeluargaan
- D Saling menghormati antar umat beragama
- E Tidak menyinggung perasaan umat beragama

4. Era tahun berapakah konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dicanangkan?

- A 1970
- B 1960
- C 1980
- D 1950
- E 1990

5. Dibawah ini adalah isi dari Konsep Tri Kerukunan Beragama. Kecuali...

- A Kerukunan intern umat beragama
- B Kerukunan Antara umat beragama
- C Kerukunan Antara umat fanatisme
- D Kerukunan Antara umat beragama dengan pemerintah
- E Kerukunan Antara umat beragama

6. Pada tanggal 3 Januari 1946 Pemerintah mendirikan Departemen yang bertugas menelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam bidang agama. Departemen apakah yang dimaksud?...

- A Departemen Agama RI
- B Departemen Keagamaan
- C Departemen Pengurus agama

[D](#) Departemen urusan Agama

[E](#) Departemen Keuangan



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Penilaian Diri 3

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Saya mengetahui apa yang diharapkan pada alinea kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Saya memahami perbedaan antara konstitusi dengan UUD	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Saya mengetahui makna yang terkandung dalam Pasal 29 UUD 1945	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
04.	Saya memahami dasar hukum kebebasan beragama di Indonesia	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
05.	Apakah anda mengetahui peran kerukunan umat beragama dalam menjaga keutuhan negara	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Kegiatan Pembelajaran 4

## 1. TUJUAN

Hallo..generasi hebat...

Setelah melalu 4 pembelajaran, sekarang kita tiba di pembelajaran terakhir. Melalui kegiatan belajar mandiri dengan memahami isi uraian materi tentang ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara, warga Negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, dengan pengamatan gambar pada modul ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif (kemandirian), kerjasama (gotong royong) dan kejujuran (integritas).

Mengawali pembelajaran modul ini perhatikan gambar berikut ini:



**Gambar 7 : Aparat negara**  
(sumber: [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com))

"Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita." – **Bung Karno**

## 2. URAIAN MATERI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis bagi negara kita yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, fungsi dan kewenangan lembaga negara, agama, dan masih banyak lagi. Bagian ini kita akan secara khusus mempelajari ketentuan konstitusi negara kita yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan.

### 2.1. Pertahanan dan Keamanan

Sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia diatur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Dalam pembangunan pertahanan negara, pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara, antara lain peningkatan kekuatan pertahanan di Natuna. Selain itu dilakukan penjagaan di perbatasan NKRI menggunakan Kapal Selam KRI Nagapasa, KRI, Shukoi, pos penjagaan yang tersebar di perbatasan Indonesia dengan negara lain.

Macam-Macam Pertahanan Di Negara Indonesia :

- Pertahanan militer
- Pertahanan non militer

## 2.2 Komponen Pertahanan Di Indonesia

Komponen yang paling utama yang ada di pertahanan di dalam sistem pertahanan di negara Indonesia adalah, TNI. Komponen utama tersebut dibantu oleh beberapa komponen cadangan dan komponen pendukung, yang bertujuan untuk menghadapi serangan atau ancaman yang sifatnya non militer.

Sebagai komponen utama, TNI memiliki tugas yaitu harus mampu menghadapi ancaman militer, serta melaksanakan tugas pertahanan lainnya. Komponen cadangan merupakan sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang dipersiapkan untuk memperkuat dan memperbesar kemampuan dan kekuatan dari TNI yang menjadi komponen utama sebagai pertahanan.

Komponen pendukung berfungsi untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan, dari kedua komponen sebelumnya. Komponen ini meliputi sumberdaya nasional yang tujuannya bukan untuk pertahanan fisik. Sumber daya yang termasuk ke dalam komponen pendukung adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Sub komponen pendukung adalah :

Paramiliter Yang mencakup :

- Polisi
- Satpol PP
- Satpam
- Linmas atau Hansip
- Menwa
- Satgas partai
- Organisasi beladiri

- Organisasi kepemudaan

Dalam pembangunan keamanan, pemerintah mengupayakan:

- Deteksi dini penanggulangan Terorisme.
  1. Pembentukan badan siber dan sandi negara
  2. Penanganan kasus penyebaran paham radikal melalui internet
  3. Penegakkan hukum terhadap radikal yang terafiliasi ISIS
- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
  1. Penanganan gejolak aksi masa
  2. Pengamanan kegiatan skala internasional
  3. Pengamanan pilkada serentak di seluruh wilayah
  4. Pengamanan hari besar keagamaan
- Pengungkapan kasus illegal fishing.
  1. 2015 terjadi 371 kasus
  2. 2016 terjadi 460 kasus
  3. Juli 2017 terjadi 212 kasus

### 3. RANGKUMAN

---

1. Pertahanan negara dimaknai sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dasar hukum mengenai pertahanan negara tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2002

2. Kewajiban bela negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib iut serta dalam upaya pembelaan negara.

“I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined, that our nation, and the world as a whole, shall not be the play thing of one small corner of the world” — **Soekarno**



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Latihan Essay 4

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokkan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Apa yang dimaksud pertahanan dan keamanan republik indonesia?

Alternatif penyelesaian

02. Keamanan nasional dalam International Encyclopaedia of the Social Science mendefinisikan keamanan sebagai ...

Alternatif penyelesaian

03. Apakah yang menjadi landasan Ketahanan Nasional ?

Alternatif penyelesaian

04. Siapa saja penyelenggara pertahanan dan keamanan nasional?sebutkan tujuannya?

Alternatif penyelesaian

05. Apakah yang dimaksud dengan Ketahan Nasional?

Alternatif penyelesaian



Daftar Isi

## Latihan Pilihan Ganda 4

1. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan ...
- A Kerakyatan, kesemestaan, kenegaraan
  - B Kesemestaan, keamanan, kenegaraan
  - C Kerakyatan, kewilayahan, kenegaraan
  - D Kerakyatan, kesemestaan, kewilayahan
  - E Kewilayahan, kenegaraan, keamanan
- 
2. Aspek-aspek kehidupan sosial antara lain, kecuali ...
- A Penduduk Indonesia berada di daerah berpendudukan padat
  - B Ideologi Indonesia yang terletak antara komunisme di timur dan liberalisme di barat
  - C Kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
  - D Masyarakat Indonesia berada di anantara masyarakat sosialis
  - E Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan
- BENAR...
- 
3. UU No. 1 Tahun 2009 berisi tentang ...
- A Menjelaskan tentang HAM
  - B Hak-hak untuk mengeluarkan pendapat
  - C Mengatur kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran wilayah

udara pegawai sipil

- D Mengatur lalu lintas
- E Mengatur keamanan negara dan bela negara

4. Komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah ...

- A TNI, POLRI, Rakyat
- B AU, AL, AD, POLRI
- C TNI, POLRI, SATPAM
- D TNI, POLRI, SAR
- E TNI, POLRI, HANSIP

5. Apa peranan TNI dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta?

- A Sebagai kekuatan pendukung
- B Sebagai kekuatan utama sistem pertahanan
- C Sebagai pemimpin negara
- D Sebagai penjaga istana merdeka
- E Sebagai kekuatan utama sistem keamanan

6. Di bawah ini merupakan ancaman terhadap integrasi nasional, *kecuali* ...

- A Berkelahi dengan teman
- B Agresi
- C Spionase
- D Paham komunis
- E Monopoli

7. Berikut wujud partisipasi terhadap konstitusi negara yang diterapkan dalam sekolah, *kecuali*....

- A taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah
- B melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik
- C mengembangkan sikap sadar dan rasional
- D melaksanakan hasil keputusan bersama
- E taat dan patuh terhadap orang tua

8. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai ....

- A Kekuatan utama sistem keamanan
- B Kekuatan utama sistem pertahanan
- C Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
- D Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
- E Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan

9. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan .....

- A Menjadi prajurit TNI/Polri
- B Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
- C Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
- D Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
- E Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

10. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran

kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap...

- A Patriotisme
- B Kedaulatan negara
- C Ketenteraman negara
- D Keamanan Indonesia
- E Pertahanan Indonesia



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Penilaian Diri 4

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Saya telah memahami makna dari pertahanan dan keamanan negara	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Saya telah mengetahui siapa yang harus menjaga pertahanan dan keamanan negara	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Saya mengetahui dasar hukum pertahanan negara	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
04.	Saya memahami upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keamanan negara	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
05.	Saya akan berupaya ikut serta menjaga keamanan negara	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Evaluasi

## Soal 1.

Kewajiban Negara dalam dalam hal agama adalah ....

- A. Mencampuri urusan agama
- B. Merusak kepercayaan setiap warganya
- C. Memenuhi dan melindungi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan
- D. Melakukan diskriminasi
- E. Melarang untuk melaksanakan ibadah setiap warganya

## Soal 2.

isi dari pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 dan pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 adalah..

- A. setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya
- B. hak untuk bertempat tinggal yang layak
- C. hak memperoleh pendidikan
- D. hak kedudukan yang sama di depan hukum

- E. Hak mendapat remisi

### Soal 3.

Ancaman bagi integrasi nasional yang datang dari luar maupun dalam negeri berupa ancaman ...

- A. Tidak ada ancaman
- B. Ancaman militer
- C. Ancaman non militer
- D. Ancaman penjara
- E. Ancaman non militer dan militer

### Soal 4.

Berikut ancaman militer pada hakikatnya mengancam melalui non militer dan kemampuannya bisa membahayakan, kecuali ...

- A. Turunnya mata uang rupiah
- B. Keselamatan segenap bangsa
- C. Kedaulatan negara
- D. Kepribadian bangsa
- E. Keutuhan wilayah negara

### Soal 5.

Ancaman non militer di bidang ekonomi merupakan salah satu ancaman yang membahayakan. Hal ini disebabkan oleh ...

- A. Globalisasi
- B. Nilai mata uang menurun
- C. Memang diancam dari luar negeri
- D. Menurunnya kualitas ekonomi
- E. Diganggu oleh negara

### Soal 6.

Orang yang bertempat tinggal atau berdomisili dalam sebuah negara dalam waktu yang lama disebut dengan ...

- A. Penduduk
- B. Perantau
- C. Imigran
- D. Populasi
- E. Individu

### Soal 7.

Mereka yang tinggal di dalam wilayah suatu negara hanya untuk sementara waktu (tidak menetap) yaitu ...

- A. orang mendapat suaka politik
- B. kewarganegaraan
- C. penduduk
- D. warga negara

- E. bukan penduduk

### Soal 8.

Orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dinamakan...

- A. partied
- B. repudiasi
- C. apatride
- D. patride
- E. apartied

### Soal 9.

Orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap/ganda dinamakan ....

- A. dwipatride
- B. apatride
- C. bipatride
- D. tipatride
- E. patride

### Soal 10.

Salah satu konsep dalam menentukan asas kewarganegaraan adalah ius soli yang berarti ...

- A. Tanpa harus mengajukan permohonan kewarganegaraan
- B. Tanpa memandang kewarganegaraan orang tuanya
- C. Memperhatikan hubungan pertalian darah dengan orang tuanya
- D. Harus mengajukan permohonan pewarganegaraan
- E. Harus mengikuti aturan pemerintah setempat

 Hasil Evaluasi

Nilai	Deskripsi
20.00	Belum lulus. Lakukan review pembelajaran

 Daftar Isi

## Daftar Pustaka

Fatwa, A.M .2009. Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kompas.

Kardiman Yuyus, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Erlangga.

Kementerian Agama. 2012. Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Suryana, Yana dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Kelas X. Klaten: Intan Pariwana.

<https://abelpetrus.wordpress.com/geography/indonesia-dalam-keragaman-sosial-dan-budaya/>



Daftar Isi